

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PER KAPITA REGIONAL DI INDONESIA

Kanetasya Sabilla¹, Wihana Kirana Jaya²

¹Direktorat Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jalan Taman Suropati No. 2, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, Indonesia,
Phone: +62 21 3927511

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Humaniora No.01 Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia, Phone: +62 274 548510
E-mail korespondensi: kanetasya@gmail.com

Naskah diterima: September 2013; disetujui: Maret 2014

Abstract: *Fiscal decentralization policy is enforced in Indonesia nowadays to regulate the relationship between central and local government. A region can determine fiscal policy in their own region in order to local needs fulfillment to be more efficient because the local government is considered knows better about the local people condition and preferences in their own region so that people can be more prosperous. This research analyzes the effect of fiscal decentralization to regional economic growth per capita as an approach of people welfare in every province at Indonesia during the period 2006-2010 by using panel data. Furthermore, this research also analyzes the effect of other variables that can affect regional economic growth per capita, they are labor force and international trade. Based on the result, we can conclude that fiscal decentralization affects positively to regional economic growth per capita so does labor force. But, international trade does not affect and even affects negatively to regional economic growth per capita.*

Keywords: *fiscal decentralization; economic growth; labor; panel data*

JEL Classification: *O23, R12*

Abstrak: *Kebijakan desentralisasi fiskal saat ini sedang diberlakukan di Indonesia untuk mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebuah daerah dapat menentukan kebijakan fiskal di daerahnya sendiri agar pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah menjadi lebih efisien karena pemerintah daerah dianggap lebih tahu kondisi dan preferensi masyarakat di daerah masing-masing sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional sebagai pendekatan kesejahteraan masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2006-2010 dengan menggunakan data panel. Selain itu, studi ini juga menganalisis pengaruh variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi per kapita regional, yaitu: tenaga kerja dan perdagangan internasional. Hasil studi memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional, begitu juga dengan tenaga kerja. Namun, perdagangan internasional tidak berpengaruh dan bahkan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional.*

Kata kunci: *desentralisasi fiskal; pertumbuhan ekonomi ; tenaga kerja; data panel*

Klasifikasi JEL: *O23, R12*

PENDAHULUAN

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah banyak dibahas melalui berbagai studi dewasa ini seperti dalam bidang ilmu politik, administrasi, geografi, dan ekonomi. Hal ini antara lain berasal dari argumen bahwa pemerintah pusat dianggap lebih baik mendelegasikan beberapa tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Oates, 1999). Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Kata otonomi sebenarnya berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan atau undang-undang. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai mengatur atau mengurus urusan rumah tangganya sendiri (Sumodiningrat, 2004).

Dalam ilmu ekonomi, desentralisasi fiskal menjadi salah satu isu yang diteliti untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal sendiri sudah tersebar ke seluruh belahan dunia sejak beberapa tahun terakhir ini termasuk di negara-negara berkembang (Ebel and Yilmaz, 2002). Bahkan, negara-negara bekas komunis yang dulu dikenal dengan sistem pemerintahan yang terpusat seperti di negara-negara Eropa Timur bekas jajahan Uni Soviet juga melakukan kebijakan ini.

Sodiq dan Nuryadin (2005) menyatakan desentralisasi telah mendorong terjadinya pembagian kewenangan (*authority sharing*) yang ditandai dengan semakin meningkatnya peran daerah dan inisiatif lokal (*authonomy*). Meningkatnya tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah pada gilirannya akan mengakibatkan perubahan peran, fungsi, kelembagaan, dan sumberdaya manusia di berbagai tingkat pemerintah.

Bird dan Vaillancourt (1998) mendefinisikan desentralisasi dengan membaginya ke dalam tiga istilah yang berbeda: dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Dekonsentrasi adalah penyebaran tanggung jawab dari pemerintah pusat ke kantor cabang atau unit administratif lokal. Delegasi merupakan sebuah situasi di

mana pemerintah daerah bertindak sebagai agen pemerintah pusat untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Sedangkan devolusi merupakan sebuah situasi di mana pemerintah daerah tidak hanya mengimplementasikan arahan dari pemerintah pusat, tapi juga terdapat otoritas untuk memutuskan kebijakan.

Tanzi (1996) menyatakan desentralisasi fiskal sendiri mengacu pada pemberian penugasan dan otoritas yang sah kepada pemerintah daerah untuk memungut (beberapa jenis) pajak tertentu, termasuk juga kewenangan untuk menetapkan basis dan tarif pajak. Pemerintah daerah juga diberi kewenangan yang sah tentang fungsi-fungsi pengeluaran yang wajib dilaksanakan oleh daerah.

Desentralisasi fiskal memiliki empat pilar (UNDP, 2005), yaitu: tanggung jawab pengeluaran, penugasan pendapatan, transfer antarpemerintah, dan pinjaman daerah. *Pilar pertama*, tanggung jawab pengeluaran, menjelaskan fungsi-fungsi manakah yang harus ditugaskan kepada tingkatan yang berbeda dalam keseluruhan sistem pemerintahan di sebuah negara. Tanggung jawab pengeluaran sangat bergantung pada kondisi daerah dan tidak ada penugasan yang dianggap paling baik secara umum. *Pilar kedua*, penugasan pendapatan, menentukan sumber-sumber pendapatan mana yang ditugaskan untuk pemerintah daerah. Penugasan pendapatan bergantung pada tanggung jawab pengeluaran karena penganggaran seharusnya menyesuaikan dengan program yang telah ditetapkan. *Pilar ketiga*, transfer antarpemerintah, diperlukan oleh sebuah daerah jika penugasan pendapatan tidak menjamin kecukupan pendapatan. *Pilar keempat*, pinjaman daerah, diperlukan jika tidak terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan daerah yang sudah memasukkan transfer antarpemerintah. Pinjaman daerah sebaiknya dilakukan untuk program pembangunan jangka panjang yang tidak rutin dikeluarkan.

Desentralisasi fiskal di negara berkembang beberapa dilatarbelakangi karena pemerintah berusaha memperbaiki efisiensi ekonomi, mencapai efisiensi biaya, memperbaiki akuntabilitas, atau meningkatkan mobilisasi sumber daya (Bird dan Vaillancourt, 1998). Litvack, *et.al.* (1998) dalam Matsui (2003) menyatakan empat manfaat lainnya dari mengaplikasikan

desentralisasi fiskal di sebuah negara. *Pertama*, pencapaian efisiensi alokatif dalam menghadapi perbedaan preferensi lokal terhadap barang publik. *Kedua*, perbaikan daya saing pemerintah. *Ketiga*, pencapaian tata kelola yang baik. *Terakhir*, perbaikan legitimasi dan *sustainability* daerah-daerah yang heterogen.

Tabel 1. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Daerah di Indonesia

Tahun	UU No.	Tentang
1945	1	– Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah
1948	22	– Penetapan Aturan-Aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
1956	32	– Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-Daerah
1957	1	– Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
1974	5	– Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
1979	5	– Pemerintahan Daerah
1999	22	– Pemerintahan Daerah
1999	25	– Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2004	32	– Pemerintahan Daerah
2004	33	– Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia

Di Indonesia, desentralisasi fiskal juga telah diberlakukan melalui undang-undang pemerintahan daerah terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Sebagai negara dengan bentuk geografis berupa kepulauan, Indonesia membutuhkan peraturan yang tepat dalam hal hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa peraturan tentang pemerintah daerah pun dibuat. Pembuatan UU ini tidak lepas dari konstitusi dasar Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang berisi dasar peraturan tentang pemerintahan daerah. Bunyi pasal tersebut yakni “Pembagian Daerah atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat Istimewa.” Tabel 1 menunjukkan beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam UU No. 25 Tahun 1999, tercantum bahwa Indonesia menerapkan desentralisasi dalam tiga variasi, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat e). Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah (pasal 1 ayat f). Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan (pasal 1 ayat g).

Tabel 2 anggaran yang dialokasikan untuk belanja daerah setiap tahunnya meningkat jika dilihat dari nominalnya. Namun jika dilihat melalui persentase terhadap total belanja negara, total belanja daerah yang dikeluarkan oleh negara tidak selalu meningkat setiap tahunnya dan persentasenya tidak jauh berbeda.

Tabel 2. Total Belanja Daerah dan Persentasenya terhadap Total Belanja Negara dalam APBN 2001-2011

Tahun APBN	Total Belanja Daerah (dalam trilyun Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja Negara
2001	81,68	26%
2002	97,97	28%
2003	116,88	31%
2004	119,04	32%
2005	131,55	33%
2006	220,27	34%
2007	258,79	34%
2008	281,23	33%
2009	320,69	31%
2010	322,42	31%
2011	392,98	32%

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Republik Indonesia (diolah)

Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat sejak tahun 2001 minimal mengalokasikan 26 persen dari total belanja negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembelanjaan di daerah. Setelah adanya UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah pusat minimal harus mengalokasikan 31 persen dari total anggarannya untuk belanja daerah. Selama sepuluh tahun terakhir ini, persentase total belanja daerah terhadap total belanja negara yang tertinggi terjadi pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 34 persen.

Walaupun sudah banyak negara yang menerapkan sistem desentralisasi fiskal, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi masih diperdebatkan. Seperti yang telah diterangkan di atas, desentralisasi fiskal, atau devolusi kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilihat sebagai bagian dari reformasi untuk memperbaiki efisiensi sektor publik, sehingga kebijakan ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetisi antarpemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Bird dan Wallich, 1993; Oates, 1993).

Berdasarkan pengamatan pada beberapa studi tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, kesimpulan studi tidak sama. Sebagai contoh, Zhang dan Zou (1998) melakukan analisis data panel untuk menguji pengaruh dan arah hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di China dengan kesimpulan akhir arah hubungan yang negatif. Sementara Faridi (2011) meneliti hubungan ini di Pakistan juga dengan menggunakan data panel dan menemukan pengaruh dan arah hubungan yang positif. Perbedaan hasil ini, menurut Faridi (2011) disebabkan oleh perbedaan ukuran desentralisasi fiskal di beberapa studi. Pengukuran yang tidak akurat dapat menyebabkan perbedaan pengaruh antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi (Ebel dan Yilmaz, 2002).

Lan dan Sajid (2011) menyatakan bahwa Desentralisasi fiskal yang diukur melalui sisi pengeluaran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di 61 provinsi di Vietnam. Sementara hasil sebaliknya terjadi ketika desentralisasi diukur melalui sisi pendapatan. Hal ini

ditengarai terjadi karena pemerintah pusat memberikan otonomi lebih besar pada sisi pendapatan dibandingkan pada sisi pengeluaran. Shahdani, *dkk* (2012) menyatakan bahwa Desentralisasi berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 30 provinsi di Iran.

Menurut Oates (1999), tidak ada teori formal yang menjelaskan hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran dari kesejahteraan masyarakat merujuk pada perbedaan hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya. Karena keberhasilan dari desentralisasi di setiap negara bukanlah sebuah kepastian, beberapa faktor juga mempengaruhi keberhasilan desentralisasi fiskal. Bird dan Vaillancourt (1998) menyatakan pokok dari desentralisasi lebih tergantung kepada negara itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sejarah, tradisi, kelembagaan, politik, dan ekonomi. Desentralisasi telah diaplikasikan dalam bentuk yang berbeda di negara yang berbeda pada waktu yang berbeda, dan bahkan jenis desentralisasi yang sama dapat menghasilkan dampak yang berbeda karena perbedaan kondisi lainnya.

Salah satu wujud desentralisasi fiskal di Indonesia adalah berupa dana perimbangan yang diserahkan dan dilimpahkan wewenang penggunaannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini memiliki empat komponen, yaitu dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil pajak (DBHP), dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP). Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri besaran pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah serta laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan kekayaan daerah. Penggunaan anggaran penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dan PAD menjadi kewenangan daerah untuk mengalokasikannya demi kesejahteraan masyarakat di daerah yang dapat diukur dari berapa besar pertumbuhan per kapita di setiap provinsi.

Di samping desentralisasi fiskal, ada banyak faktor yang dipertimbangkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Beberapa teori juga telah menjelaskan faktor-faktor

apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menggunakan fungsi produksi yang berisi dua input, yaitu modal dan tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, menurut teori pertumbuhan neoklasik, perdagangan internasional akan menjadi faktor dari luar negeri yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi (Todaro dan Smith, 2009). Perbedaan kondisi tenaga kerja dan perdagangan internasional di setiap daerah dapat memperlihatkan karakteristik daerah masing-masing.

Studi ini mencoba menjelaskan pengaruh sektor publik dan faktor dari dalam serta luar negeri tersebut kepada pertumbuhan per kapita regional dalam kasus Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai dalam studi ini adalah sebagai berikut, yaitu: untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional di Indonesia, untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional di Indonesia, untuk menganalisis pengaruh perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2006-2010 pada seluruh provinsi di Indonesia serta data-data provinsi lainnya dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan pada tahun yang sama. Tahun

2006-2010 diambil sebagai tahun analisis karena UU terbaru yang mengatur pemerintahan daerah di Indonesia dikeluarkan pada tahun 2004 sehingga dapat dilihat apakah peraturan yang terbaru ini memiliki dampak yang positif secara ekonomi atau tidak. Selain itu, berdirinya beberapa provinsi baru membuat ada beberapa data yang tidak tersedia pada tahun-tahun sebelumnya.

Studi ini mengukur desentralisasi fiskal melalui sisi penerimaan bukan seperti beberapa studi sebelumnya yang mengukurnya melalui sisi pengeluaran, sehingga model yang digunakan dalam studi ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{LogGDP}_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{LogPAD}_{it} + \beta_2 \text{LogDAUK}_{it} + \\ & \beta_3 \text{LogDBH}_{it} + \beta_4 \text{LogWORK}_{it} + \beta_5 \text{EX}_{it} + \\ & \beta_6 \text{IM}_{it} + u_{it} \end{aligned} \quad 1)$$

Alat analisis yang digunakan adalah uji t tiap variabel dan uji f seluruh model dengan metode *Panel Ordinary Least Square*. Ada tiga metode yang harus dipilih sebagai metode dengan estimasi terbaik, yaitu *common effect*, *fixed effect*, atau *random effect*. Untuk menguji metode manakah yang memiliki estimasi terbaik, digunakan uji Hausman dalam memilih antara metode *fixed* dan *random effect* serta uji f atau uji Chow dalam memilih antara metode *common* dan *fixed effect*.

Statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam studi ini dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3 variabel dengan sebaran data yang

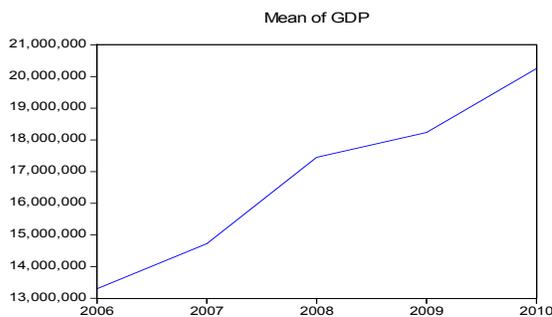
Tabel 3. Statistik deskriptif

	GDP	PAD	DAUK	DBH	WORK	EX	IM
Mean	16792842	1,23E+12	5,58E+11	6,39E+11	3093842	0,28673	0,48314
Median	12131534	5,12E+11	5,18E+11	1,61E+11	1705905	0,214	0,067
Maximum	95096207	1,18E+13	1,63E+12	1,03E+13	19305056	1,668	17,277
Minimum	2982284	1,86E+10	2,20E+10	4,10E+09	47309	0,001	0
Std. Dev,	17503816	2,01E+12	2,48E+11	1,50E+12	4570761	0,28215	2,1283
Skewness	2,887319	3,146613	1,000402	4,43592	2,561309	2,03526	6,26075
Kurtosis	11,00529	13,65534	5,179149	24,1577	8,257129	8,52412	42,1225
Jarque-Bera	669,8393	1052,844	59,07537	3618,709	370,4156	323,709	11249,1
Probability	0	0	0	0	0	0	0
Sum	2,77E+09	2,03E+14	9,04E+13	1,05E+14	5,10E+08	47,31	77,303
Sum Sq. Dev,	5,02E+16	6,64E+26	9,88E+24	3,68E+26	3,43E+15	13,0555	720,216
Observations	165	165	162	165	165	165	160

paling bervariasi adalah data PAD. Hal ini dapat dilihat dari nilai standar deviasi yang paling besar. Sedangkan karena data ekspor dan impor diukur berdasarkan rasio terhadap PDRB, sebaran datanya menjadi tidak terlalu bervariasi dibandingkan dengan yang lain. Karena itu, penulis memilih untuk mengukur variabel selain rasio ekspor dan impor terhadap PDRB dengan menggunakan logaritma agar sebaran datanya semakin mengelompok sehingga dapat lebih mudah diestimasi.

Ukuran Jarque-Bera menunjukkan apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai Jarque-Bera lebih tinggi dari nilai probabilitas, artinya data tersebut berdistribusi normal. Pada tabel 3 seluruh nilai probabilitas Jarque-Bera menunjukkan angka 0 yang dapat diartikan bahwa tidak ada satu pun variabel yang digunakan dalam studi ini yang berdistribusi normal. Namun, karena data yang digunakan bukan data dengan sampel acak yang berasal dari data primer, data tersebut dapat dikatakan tidak bias. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, studi ini menggunakan data sekunder.

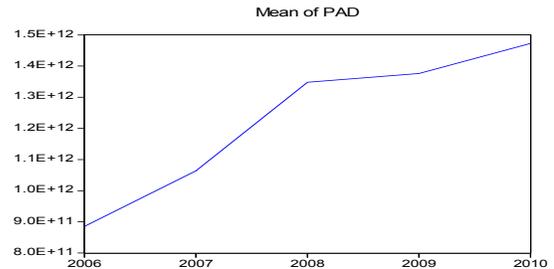
Karena studi ini menggunakan data panel dengan jumlah *cross-section* sebanyak 33, sulit untuk melihat persebaran data setiap provinsi secara lebih mendetail. Karena itu, perkembangan variabel akan dilihat setiap tahunnya dari tahun 2006 sampai tahun 2010 dengan menggunakan rata-rata seluruh provinsi setiap tahun. Analisis ini digunakan untuk melihat perkembangan rata-rata variabel setiap tahunnya sehingga dapat ditentukan apakah suatu variabel memiliki kecenderungan peningkatan atau sebaliknya.



Gambar 1. Rata-Rata PDRB per kapita setiap provinsi di Indonesia

Pada gambar 1 terlihat bahwa variabel PDRB riil per kapita di setiap provinsi di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya jika diukur dengan rata-rata PDRB riil per kapita setiap provinsi di setiap tahun. Pada tahun 2006, rata-rata PDRB riil per kapita setiap provinsi di Indonesia hanya sebesar: Rp13.304.756 dan angka ini semakin meningkat hingga mencapai angka rata-rata tertingginya pada tahun 2010 sebesar Rp20.252.423.

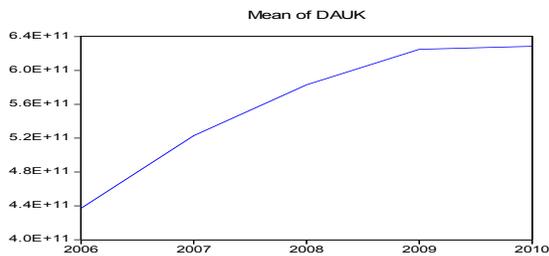
Berdasarkan tabel 3 juga dapat diartikan bahwa PDRB riil per kapita seluruh provinsi di Indonesia tidak terpengaruh krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009 karena krisis global yang seharusnya berdampak pada penurunan PDRB riil justru tidak terjadi.



Gambar 2. Rata-rata PAD setiap provinsi di Indonesia

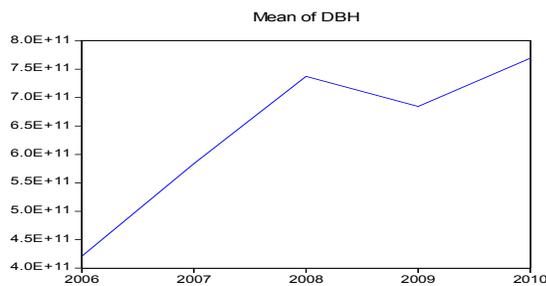
Gambar 2 menunjukkan rata-rata PAD seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2006-2010 selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, rata-rata PAD seluruh provinsi di Indonesia mencapai Rp 1.472.876.967.576, nilai tertinggi selama 5 tahun terakhir di mana nilai terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar Rp909.804.971.537. Peningkatan PAD ini juga menunjukkan kemampuan daerah untuk terus meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri dan menghilangkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Gambar 3 menunjukkan rata-rata DAU ditambah DAK setiap provinsi di Indonesia pada periode 2006-2010. Dari gambar ini terlihat meskipun rata-rata PAD meningkat setiap tahunnya, DAU dan DAK yang diterima oleh daerah setiap tahunnya juga meningkat.



Gambar 3. Rata-rata DAU ditambah DAK setiap provinsi di Indonesia

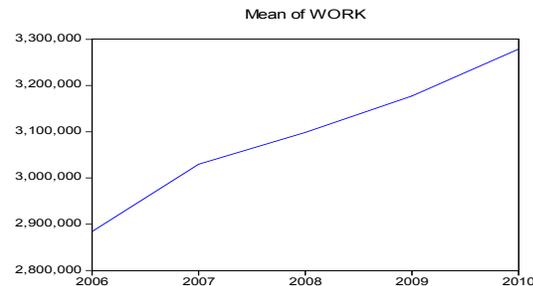
Rata-rata DAU dan DAK pada tahun 2006 merupakan yang terkecil, dengan nilai sebesar Rp442.836.971.576. Rata-rata DAU dan DAK pada tahun 2010 merupakan yang terbesar, dengan nilai sebesar Rp609.335.965.272. Peningkatan ini dapat mengindikasikan pemerintah pusat semakin mendesentralisasi anggaran agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih banyak untuk keperluan daerahnya masing-masing. Dibandingkan dengan rata-rata PAD, rata-rata DAU dan DAK seluruh provinsi di Indonesia menunjukkan angka yang lebih kecil. Ini juga mengindikasikan semakin berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pusat.



Gambar 4. Rata-rata DBH setiap provinsi di Indonesia pada 2006-2010

Dana Bagi Hasil, bersama dengan DAU dan DAK merupakan salah satu wujud desentralisasi di Indonesia dari sisi penerimaan. Gambar 4 menunjukkan rata-rata DBH setiap provinsi di Indonesia pada 2006-2010. Meski memiliki kecenderungan peningkatan setiap tahunnya, rata-rata PAD sempat menurun pada tahun 2009. Tapi penurunan ini tidak diikuti dengan penurunan lagi pada tahun berikutnya,

pada tahun 2010 rata-rata DBH seluruh provinsi di Indonesia kembali meningkat dengan nilai Rp769.148.949.879. Pada tahun 2010 dan secara rata-rata keseluruhan, nilai DBH lebih tinggi dibandingkan nilai DAU ditambah DAK. Hal ini mengindikasikan pemerintah pusat lebih banyak memberikan dana perimbangan kepada daerah dalam bentuk DBH dibandingkan yang lain.



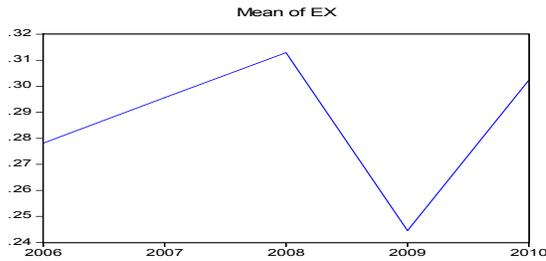
Gambar 5. Rata-rata tenaga kerja setiap provinsi di Indonesia pada 2006-2010

Gambar 5 menunjukkan rata-rata tenaga kerja yang dimiliki oleh seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2006-2010. Rata-rata tenaga kerja seluruh provinsi di Indonesia juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan angka tenaga kerja yang terus meningkat mengindikasikan kemampuan daerah untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada penduduk di daerahnya. Namun, kenaikan jumlah rata-rata tenaga kerja ini juga harus diimbangi dengan kenaikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar peningkatan tenaga kerja berdampak positif pada kenaikan produksi daerah.

Gambar 6 menunjukkan rata-rata rasio ekspor riil terhadap PDRB riil seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2006-2010. Rasio ini menunjukkan intensitas perdagangan setiap provinsi di Indonesia. Rasio ini sempat mengalami peningkatan pada periode 2006-2008. Namun, rasio ekspor terhadap PDRB ini harus mengalami penurunan tajam pada tahun 2009.

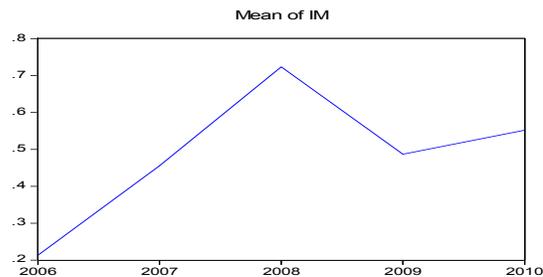
Hal ini dikarenakan adanya krisis ekonomi global yang berdampak pada lesunya perdagangan dunia pada saat itu. Setelah melewati krisis ekonomi global, rata-rata rasio ekspor ter-

hadap PDRB seluruh provinsi di Indonesia kembali meningkat.



Gambar 6. Rata-rata rasio ekspor terhadap PDRB setiap provinsi di Indonesia

Gambar 7 menunjukkan rata-rata rasio impor riil terhadap PDRB riil seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2006-2010. Rasio ini juga menunjukkan intensitas perdagangan setiap provinsi di Indonesia. Sama dengan rasio ekspor terhadap PDRB, rasio ini sempat mengalami peningkatan pada periode 2006-2008. Namun rasio ekspor terhadap PDRB ini menurun pada tahun 2009. Hal ini juga dikarenakan oleh adanya krisis ekonomi global. Rasio impor terhadap PDRB kembali meningkat pada tahun 2010 selepas krisis ekonomi global.



Gambar 7. Rata-rata rasio impor terhadap PDRB setiap provinsi di Indonesia

Analisis yang digunakan oleh penulis dimulai dari melakukan estimasi dengan metode *Fixed Effect* karena metode *Common Effect* yang mengasumsikan data *cross-section* sama sepanjang data *time-series* tidak sesuai dengan realita sehingga studi ini pun tidak membutuhkan uji F. Analisis dilanjutkan dengan melakukan estimasi dengan menggunakan metode *Random Effect*. Seluruh estimasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 6. Hasil

estimasi menggunakan metode *Fixed Effect* (FE) dan *Random Effect* (RE) dirangkum oleh tabel 4.

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel Metode *Fixed Effect* dan *Random Effect*

Variabel Dependen: Log(PDRB Per Kapita)	Fixed Effect	Random Effect
Konstanta	-3,880910 (1,758011)	5,958662 (0,930914)
Log(PAD)	0,206475*** (0,048153)	0,305770*** (0,043624)
Log(DAUK)	0,063251*** (0,031716)	-0,008685 (0,029498)
Log(DBH)	0,099010*** (0,040532)	0,211303*** (0,032241)
Log(WORK)	0,730030*** (0,149405)	-0,213522*** (0,061454)
EX	-0,347902*** (0,072710)	-0,256767*** (0,069506)
IM	0,009298 (0,008294)	0,011996 (0,007951)

*signifikan pada $\alpha=10\%$; signifikan pada $\alpha=5\%$; signifikan pada $\alpha=1\%$;

Tabel 4 memperlihatkan perbedaan hasil koefisien dan signifikansi pada kedua jenis metode. Pada metode FE, koefisien konstanta bernilai negatif. Sementara pada metode RE, koefisien konstanta bernilai positif. Perbedaan juga terdapat pada jumlah variabel independen yang signifikan pada $\alpha=1\%$. Pada model FE, seluruh koefisien parameter bernilai signifikan $\alpha=1\%$ kecuali untuk variabel rasio impor/PDRB. Sementara pada model RE, selain variabel rasio impor/PDRB yang tidak signifikan pada $\alpha=1\%$, variabel logaritma DAU ditambah DAK juga tidak signifikan pada $\alpha=1\%$.

Tabel 5 menunjukkan nilai *R-squared* pada metode FE lebih besar daripada metode RE yang menunjukkan metode FE lebih mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen melalui variabel-variabel independen. Ukuran *F-statistic* dari kedua metode menunjukkan signifikansi pada $\alpha=1\%$ sehingga kedua metode dapat dikatakan signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil ukuran R-squared dan F-statistic

	<i>Fixed Effect</i>		<i>Random Effect</i>
R-squared	0,980669	R-squared	0,628145
Adjusted R-squared	0,974444	Adjusted R-squared	0,613270
F-statistic	157.5307***	F-statistic	42,23044***
Prob(F-statistic)	0,000000	Prob(F-statistic)	0,000000

*Signifikan pada $\alpha = 1\%$

Tabel 5 menunjukkan hasil uji Hausman dari kedua metode di mana nilai probabilitas sebesar 0 menunjukkan hipotesis nol ditolak dan estimasi lebih baik menggunakan metode FE. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Baltagi (2005) bahwa data panel dengan jumlah *cross-section* yang lebih banyak daripada jumlah *time-series* sebaiknya menggunakan metode FE.

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Square Statistic	Chi Square d.f.	Prob.
Cross-section random	73,168876	6	0,0000

Mengamati serangkaian analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa estimasi FE menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LogGDP}_{it} = & - 3,880910 + 0,206475\text{LogPAD}_{it} + \\ & 0,063251\text{LogDAUK}_{it} + 0,099010\text{LogDBH}_{it} + \\ & 0,730030\text{LogWORK}_{it} - 0,347902\text{EX}_{it} + \\ & 0,009298\text{IM}_{it} + u_{it} \end{aligned}$$

Koefisien konstanta yang bernilai negatif menunjukkan ketika variabel independen lain dianggap tetap maka PDRB per kapita menurun sebesar 3,881 persen. PAD mempengaruhi kenaikan PDRB per kapita. Jika PAD meningkat satu persen, PDRB per kapita akan meningkat sebesar 0,206 persen. PAD yang merupakan salah satu wujud desentralisasi fiskal dari sisi

penerimaan dan menjadi salah satu pilar desentralisasi sebagai penugasan pendapatan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di sebuah provinsi.

DAU yang ditambahkan dengan DAK mencerminkan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jika DAU dan DAK meningkat sebesar satu persen, PDRB per kapita akan meningkat sebesar 0,063 persen. Dana alokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menyeimbangkan pendapatan setiap provinsi dan untuk program-program tertentu sebagai bagian dari desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di sebuah provinsi. Dana bagi hasil sebagai ukuran desentralisasi fiskal juga berpengaruh positif pada peningkatan PDRB per kapita. Jika dana bagi hasil meningkat sebesar satu persen, PDRB per kapita akan meningkat sebesar 0,099 persen. Dana bagi hasil sebenarnya bersumber dari daerah melalui pembayaran pajak dan kepemilikan sumber daya alam kemudian dimasukkan ke dalam dana perimbangan sebagai wujud dari desentralisasi fiskal. Jika dana bagi hasil semakin ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi regional di sebuah provinsi juga akan meningkat.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam negeri yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Jika tenaga kerja meningkat satu persen, PDRB per kapita akan meningkat sebesar 0,73 persen. Peningkatan tenaga kerja, khususnya yang terdidik dan produktif, mampu meningkatkan produksi dalam negeri dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rasio ekspor terhadap PDRB menjadi satu-satunya variabel dalam hasil estimasi yang tidak dapat membuktikan hipotesis. Jika rasio ekspor terhadap PDRB meningkat sebesar satu persen, PDRB per kapita justru menurun sebesar 0,348. Walaupun bertentangan dengan hipotesis, hal ini dapat dijelaskan oleh salah satu teori pertumbuhan, yaitu teori revolusi ketergantungan internasional. Dalam teori ini, negara maju mengeksplorasi sumber daya milik negara berkembang, salah satunya dalam hal perdagangan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang (Todaro dan Smith, 2009).

Rasio impor terhadap PDRB merupakan variabel yang tidak signifikan secara statistik. Tidak signifikannya variabel independen ini berarti kegiatan impor dari negara lain tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sebuah provinsi di Indonesia.

SIMPULAN

Hasil studi ini memberikan kesimpulan bahwa: *Pertama*, desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan ukuran melalui sisi penerimaan APBD, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, seluruh variabel independen yang menjelaskan desentralisasi fiskal signifikan secara statistik dan memiliki arah hubungan positif terhadap variabel dependen, PDRB per kapita. *Kedua*, tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi dari dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional. *Ketiga*, perdagangan internasional tidak berpengaruh atau bahkan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional. Variabel rasio ekspor terhadap PDRB berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di suatu daerah dan variabel rasio impor terhadap PDRB tidak berpengaruh.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan dari studi ini adalah: *pertama*, bagi pemerintah pusat, kebijakan desentralisasi fiskal dengan memberikan lebih banyak dana perimbangan kepada daerah dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih efisien kepada masyarakat di setiap daerah. *Kedua*, bagi pemerintah daerah, PAD harus lebih ditingkatkan dibandingkan harus menggantungkan diri pada transfer dari pemerintah pusat. Jika dilihat dari pilar desentralisasi fiskal, pemerintah daerah seharusnya lebih tahu seberapa besar pendapatan yang harus mereka miliki untuk program-program pengeluaran daerah sehingga mereka dapat menyesuaikan jumlah anggaran PAD yang dimiliki dengan pengeluaran program yang sudah disepakati sebelumnya (*budget follows function*). *Ketiga*, bagi pemerintah daerah, peningkatan kesempatan kerja harus lebih ditingkatkan untuk menyerap lebih banyak

tenaga kerja. Selain itu pemerintah daerah juga harus meningkatkan keterampilan, pendidikan, dan produktivitas pekerja untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi regional. *Keempat*, kebijakan keterbukaan perdagangan internasional harus dievaluasi terlebih dahulu karena mengeksport bahan baku yang belum diolah justru akan merugikan daerah. Hal ini dapat disebabkan nilai tambah yang tidak didapatkan oleh daerah apalagi jika daerah melakukan impor untuk barang jadi yang bahan bakunya justru berasal dari daerah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Baltagi, B H. (2005). *Econometric analysis of panel data*. 3rd Ed. West Sussex: John Wiley and Sons Ltd.
- Bird, R M. dan Christine W. (1993). Fiscal decentralization and intergovernmental relations in transition economies: Toward a systematic framework of analysis'. *World Bank 1122, Policy Research Working Paper*.
- Bird, R M. dan Vaillancourt, F. (1998). Fiscal Decentralization in Developing Countries: An Overview dalam: Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt, *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge: University Press.
- Ebel, R D. dan Serdar Y. (2002). On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization. *World Bank Study 2809, Policy Research Working Paper*.
- Faridi, M Z. (2011). Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences*, 31(1): 1-13.
- Matsui, K. (2003). Decentralization in Nation State Building of Indonesia. *IDE Research Paper*, (2).
- Nguyen, L P dan Sajid A. (2011). Fiscal decentralisation and economic growth in Vietnam. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 16 (1): 3-14.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, 26 (2): 237-243.

- Oates, W E. (1999). An Essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3): 1120-1149.
- Shahdani, M S., et al., (2012). Fiscal decentralization, income distribution and economic growth: A Case Study for Iran. *Journal of Economic Theory*, 6 (2): 76-80.
- Sodiq dan Nuryadin. (2005). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia, (Studi Kasus pada 26 Provinsi). *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*. Vol. 6, No. 2, Oktober 2005: 165-182.
- Sumodiningrat, G. (2004). *Otonomi Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan: Upaya-Upaya Pengurangan Pengangguran dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Tingkat Lokal*. Jakarta.
- Tanzi, V. (1996). Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects. *Annual World Bank Conference on Development Countries*.
- Todaro, M P. dan Stephen C. S. (2009). *Economic Development*. 10th Edition. Essex: Pearson Education Limited.
- United Nations Development Program, (2005). 'Fiscal Decentralisation and Poverty Reduction'. *UNDP Primer*
- Wooldridge, J M. (2009). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. 4th Ed. Australia: South Western
- Zhang, T dan Heng-fu. (1998). Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China. *Journal of Public Economics*, 67: 221-240.